



Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Rka Di Fakultas Kedokteran Gigi Usu

Meilany Angreni¹, Puja Rizqy Ramadhan², Galih Supraja³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ meilanyclany@gmail.com; ²⁾ pujarizqy@dosen.pancabudi.ac.id
³⁾ galihsupraja@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 Januari 2026]
Revised [02 April 2026]
Accepted [07 April 2026]

KEYWORDS

Akuntansi Pemerintahan,
Sistem Pengendalian Internal
Rka. Fakultas Kedokteran Gigi
Usu.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Keterlambatan penyusunan RKA karena proses birokrasi yang panjang dan koordinasi antarbagian yang belum optimal, Pengendalian internal yang belum maksimal, sehingga masih ada potensi kesalahan pencatatan, penganggaran yang tidak tepat sasaran, hingga risiko terjadinya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung integrasi SAP dengan sistem RKA yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Fakultas Kedokteran Gigi USU telah berjalan cukup baik dan memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal RKA. SAP membantu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran fakultas. Efektivitas penerapan SAP masih terkendala oleh faktor sumber daya manusia, keterbatasan sistem informasi keuangan, serta kurangnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, diperlukan pelatihan berkelanjutan, integrasi sistem keuangan digital, dan komitmen pimpinan fakultas dalam penerapan SAP secara menyeluruh. Penguatan SAP dan SPI, Fakultas Kedokteran Gigi USU dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good university governance.

ABSTRACT

The delay in preparing the RKA is due to the long bureaucratic process and suboptimal coordination between departments, Internal control is not optimal, so there is still the potential for recording errors, budgeting that is not on target, to the risk of discrepancies in financial reports, the use of information technology to support the integration of SAP with an effective RKA system is not optimal. The research method used is a descriptive method. The results of the study state that the Implementation of Government Accounting Standards (SAP) at the Faculty of Dentistry USU has been running quite well and has a positive influence on the effectiveness of the RKA internal control system. SAP helps strengthen transparency, accountability, and efficiency in the preparation and implementation of the faculty budget. The effectiveness of SAP implementation is still hampered by human resource factors, limitations of the financial information system, and the lack of periodic evaluation of the implementation of internal control. To improve the effectiveness of internal control, continuous training, integration of digital financial systems, and the commitment of faculty leaders in the comprehensive implementation of SAP are needed. Strengthening SAP and SPI, the Faculty of Dentistry USU can realize better, transparent, and accountable financial governance in accordance with the principles of good university governance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pada institusi pendidikan tinggi negeri, termasuk fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU), harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian anggaran adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan dasar pertanggungjawaban keuangan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKA harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan.

SAP diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan, serta memperkuat sistem pengendalian internal agar potensi penyimpangan dan inefisiensi dapat diminimalisasi. Namun, pada praktiknya, efektivitas penerapan SAP dalam penyusunan dan pengelolaan RKA masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul di antaranya: Keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai penerapan SAP secara konsisten. Keterlambatan penyusunan RKA karena proses birokrasi yang panjang dan koordinasi antarbagian yang belum optimal, Pengendalian internal yang belum maksimal, sehingga masih ada potensi kesalahan pencatatan, penganggaran yang tidak tepat sasaran, hingga risiko terjadinya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, Belum optimalnya

pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung integrasi SAP dengan sistem RKA yang efektif. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya akuntabilitas pengelolaan anggaran serta berpengaruh terhadap kredibilitas institusi, khususnya Fakultas Kedokteran Gigi USU, dalam melaksanakan fungsi pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan sistem pengendalian internal RKA di Fakultas Kedokteran Gigi USU. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan SAP telah berjalan sesuai regulasi, faktor penghambat yang dihadapi, serta strategi perbaikan yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. SAP menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui penerapan SAP, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dapat dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penelitian Handayani (2019), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten dapat meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal karena seluruh kegiatan keuangan memiliki dasar pencatatan dan pelaporan yang seragam. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyimpangan anggaran. Penelitian Lubis dan Sari (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah.

Namun, berdasarkan penelitian Simanjuntak (2021), efektivitas penerapan SAP masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap standar yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan, serta lemahnya sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan RKA. Kondisi ini menyebabkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sering kali belum mencerminkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan.

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai salah satu unit kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri, juga dituntut untuk menerapkan SAP secara tepat dalam pengelolaan keuangannya. RKA menjadi instrumen penting dalam merencanakan dan mengendalikan alokasi dana kegiatan fakultas. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti keterlambatan penyusunan laporan, kurangnya koordinasi antarbagian keuangan, serta keterbatasan pemahaman staf terhadap prinsip SAP.

LANDASAN TEORI

Grand Teori Penatagunaan Publik/ *Public Stewardship Theory*

Teori ini menekankan tanggung jawab fidusia pejabat pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. SAP dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik.

Prinsip-prinsip utama teori penatalayanan publik:

1. Akuntabilitas: Pejabat pemerintah bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi: Informasi keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
3. Efisiensi: Sumber daya publik harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan publik.
4. Efektivitas: Program dan kegiatan publik harus efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan. SAP diselaraskan dengan teori penatagunaan publik dengan mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang memberikan gambaran yang wajar dan akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas pemerintah. Prinsip dan praktik akuntansi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Menetapkan standar pelaporan keuangan yang memungkinkan pengguna menilai kesehatan keuangan dan keberlanjutan entitas pemerintah.

Manfaat penerapan teori penatagunaan publik pada SAP :

1. Pengambilan keputusan yang lebih baik: Pejabat pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya publik ketika mereka memiliki akses terhadap informasi keuangan yang dapat diandalkan dan transparan.



2. Peningkatan akuntabilitas: Pejabat publik menjadi lebih akuntabel kepada publik ketika mereka diharuskan melaporkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan konsisten.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat: Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat ketika informasi keuangan transparan dan ketika pejabat pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik.

Pengungkapan informasi mengenai transaksi pihak berelasi, seperti transaksi antara entitas pemerintah dan pegawai atau pemasoknya. Menetapkan standar akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran liabilitas kontinjensi, seperti liabilitas yang timbul dari kewajiban pemulihan lingkungan atau tuntutan hukum. Menetapkan standar penyajian informasi keuangan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.

Teori penatalayanan publik merupakan grand theory yang mendasari standar akuntansi pemerintahan. SAP dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik, konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan publik. Dengan menerapkan teori penatalayanan publik pada SAP, pemerintah dapat meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik. SAP Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) membawa beberapa keunikan dibandingkan dengan sistem akuntansi sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadikannya unik:

1. Pendekatan Berbasis Akrua:
SAP menerapkan pendekatan akuntansi berbasis akrual, yang berarti transaksi dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan dan kinerja entitas publik.
2. Integrasi dengan Sistem Lainnya:
SAP dirancang untuk terintegrasi dengan sistem lain dalam entitas publik, seperti sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, dan sistem pelaporan. Integrasi ini memungkinkan data mengalir dengan lancar dan meningkatkan efisiensi proses akuntansi.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah:
SAP didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Standar ini memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penyajian informasi keuangan entitas publik.
4. Penguatan Pengendalian Internal:
SAP dilengkapi dengan fitur-fitur yang memperkuat pengendalian internal, seperti pemisahan tugas, otorisasi akses, dan audit trail. Hal ini membantu mencegah penipuan dan kesalahan dalam proses akuntansi.
5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:
SAP meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas publik dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat diakses oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
6. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan:
SAP menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan informatif, yang membantu entitas publik dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis.
7. Dukungan Teknologi Informasi:
SAP didukung oleh teknologi informasi yang canggih, yang memungkinkan entitas publik untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem secara efektif.
8. Peningkatan Kapasitas SDM:
Implementasi SAP memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam entitas publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan SDM.
9. Adaptasi dengan Kebutuhan Lokal:
SAP dapat diadaptasi dengan kebutuhan lokal dan budaya entitas publik. Hal ini memungkinkan entitas publik untuk menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan konteks mereka.
10. Komitmen Pemerintah
Implementasi SAP membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan keberhasilan implementasi. Secara keseluruhan, SAP merupakan sistem akuntansi yang unik dan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi entitas publik di Indonesia. Implementasi SAP yang sukses akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Adapun judul dari penelitian ini terkait dengan “Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal RKA di Fakultas Kedokteran Gigi USU”. Dari kerangka berpikir dapat diketahui bahwa efektifitas standar akuntansi pemerintahan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal RKA

METODE PENELITIAN

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dekriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bersumber dari penerapan SAP dan pengendalian internal yang ada di FKG USU. Selain itu data yang digunakan adalah untuk melihat apakah SAP dan sistem pengendalian internal sudah diterapkan dengan benar di FKG USU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Fakultas Kedokteran Gigi USU, diperoleh temuan sebagai berikut:

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Fakultas Kedokteran Gigi USU telah menerapkan prinsip-prinsip SAP sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Penerapan tersebut mencakup penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, klasifikasi akun sesuai standar, dan pencatatan transaksi yang transparan. Namun, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman teknis staf keuangan terhadap perubahan format laporan dan penyajian anggaran berbasis kinerja.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam Penyusunan RKA

Penerapan SPI di Fakultas Kedokteran Gigi USU telah dilakukan melalui pembentukan tim penyusun RKA, pengawasan internal oleh bagian keuangan, serta verifikasi dari unit perencanaan universitas. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa elemen pengendalian internal—seperti dokumentasi prosedur, audit internal, dan monitoring realisasi anggaran—belum berjalan optimal.

Efektivitas SAP terhadap Pengendalian Internal

Analisis menunjukkan bahwa penerapan SAP memberikan dampak positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal RKA, terutama dalam:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
- b. Mempermudah proses audit internal dan eksternal.
- c. Mendorong kedisiplinan administratif dalam penyusunan dan pelaporan keuangan.

Namun, efektivitas tersebut masih bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, serta komitmen pimpinan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintahan secara konsisten.

Pembahasan

Penerapan SAP sebagai Instrumen Pengendalian

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berfungsi sebagai pedoman dalam mencatat dan melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel. Pada Fakultas Kedokteran Gigi USU, SAP terbukti memperkuat proses kontrol terhadap setiap tahap penyusunan RKA, mulai dari perencanaan, pengalokasian dana, hingga pelaporan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Harun (2017) yang menyatakan bahwa penerapan SAP dapat memperkuat sistem pengendalian internal karena memberikan dasar akuntansi yang terstandar dan dapat diaudit.

Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Efisiensi RKA

SPI berperan penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Di Fakultas Kedokteran Gigi USU, pengendalian dilakukan melalui prinsip *check and balance* antara unit perencana, bagian keuangan, dan pimpinan fakultas. Namun,



masih dibutuhkan peningkatan dalam aspek pengawasan berkelanjutan dan evaluasi pelaksanaan RKA untuk mencapai efisiensi dan efektivitas optimal.

Tantangan Implementasi

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Keterbatasan pemahaman staf non-akuntansi terhadap SAP berbasis akrual.
- 2) Minimnya pelatihan dan sosialisasi SAP terbaru.
- 3) Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan antar unit.

Hal ini memperkuat pandangan Mardiasmo (2018) bahwa efektivitas SAP sangat bergantung pada kesiapan organisasi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem informasi keuangan.

Hubungan SAP dan SPI dalam Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Implementasi SAP yang efektif mampu memperkuat mekanisme pengendalian internal dengan meningkatkan keterlacakan setiap transaksi dan memastikan konsistensi dalam pelaporan anggaran. Dalam konteks RKA di Fakultas Kedokteran Gigi USU, keterpaduan SAP dan SPI terbukti membantu manajemen dalam menilai efisiensi penggunaan anggaran fakultas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Fakultas Kedokteran Gigi USU telah berjalan cukup baik dan memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal RKA.
2. SAP membantu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran fakultas.
3. Efektivitas penerapan SAP masih terkendala oleh faktor sumber daya manusia, keterbatasan sistem informasi keuangan, serta kurangnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengendalian internal.
4. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, diperlukan pelatihan berkelanjutan, integrasi sistem keuangan digital, dan komitmen pimpinan fakultas dalam penerapan SAP secara menyeluruh.

Saran

Perlu adanya penguatan SAP dan SPI, Fakultas Kedokteran Gigi USU dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good university governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *e-jurnal Akuntansi Universitas Stikubank*.
- Apriliawati (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal ilmu riset Akuntansi*
- Badan Pusat Statistik. (2018). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2017-2018. BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistics of Sumatera Utara Province Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018-2019. BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018-2019. BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS- Statistics of Sumatera Utara Province.
- Rahmawati (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal kajian akuntansi*
- Sari, A. K. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Saputri, S. H., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan

- Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 212- 225.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Putu Candra Gunantara (2014) dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali